

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an Al-Karim

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

### Buku

- Abdurrahman, Soejono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1979
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta. 2004
- Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1991
- Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta. 2013
- Ash Shiddiqie, TM Hasbie. 1969. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan bintang.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
- Baharudin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Bambang Waluyo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2000
- Brouwer, J.G dan Schilder. 1998. *A Survey of Dutch Administrative law*. Ars Aequilibrum : Nijmegen.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Hanafi, Ahmad. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- James. W Nickel. *Hak Asasi Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996
- Jan Rimmelink. *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-Pasal dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka. Jakarta. 2003
- JCT Simorangkir. Rudy T Erwin dan JT Prasetyo. *Kamus Hukum*. Bumi Aksara. Jakarta. 1995 Utrecht. *Ringkasan Sari Kuliyah Hukum Pidana II*. PT. Penerbitan Universitas. Bandung. 1992
- Jimly Ashiddiqe. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2006
- J.E, Sahetapy. 2007 *Memberi Tauladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Kansil, C.S.T. 2011 *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* . Jakarta: Rineke Cipta.
- K.M. Smith, Rhona. 2008. *Hukum Hak Asasi*. dalam Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM* Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Lubis, Todung Mulya. 1993. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1996-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyana W. Kusuma. *Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta. 1986 Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2002. *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Mulia.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang omor 22 Tahun 2002 tentang Grasi*.
- R. Tresna. *Azas-Azas Hukum Pidana*. PT.Tiara. Jakarta 1999
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945*.

- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Dalam Praktik*. P.T Bineka Sakti. Jakarta. 2000
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta. 1982
- Taimiyah, Ibnu. 1989. *Pedoman Islam Bernegara, Penerjemah Firdaus A.N.* Jakarta: Bulan Bintang.
- Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media. Bandung. 2013
- Termorshuizen, Marjene. 2002. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia Cet-2*. Jakarta: Djambatan.

#### Jurnal

- Huda, Ni'matul. 2017. "Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol 24, No. 2.
- Asmawi. 2014. "Konseptualisasi Teori Maslahah". *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. Ahkam : Vol XIII No. 1.
- Asmawi. 2013. "Teori Al-Maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi." *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. Ahkam: Vol. XIII, No. 2.

#### Skripsi

- Ashar, Devi Yulianar. 2018. *Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Khoeri, Ahmad Dukan. 2015. Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Sya'ban, Nisfu. 1985. Hak Presiden dalam Memberi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi. Jakarta: Universitas Indonesia.

### **Peraturan PerUndang- Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Jo.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer

### **Sumber – Sumber Lainnya**

Dr. Riana Kesuma Ayu, SH. MH. Diakses dari <http://websiteayu.com/pemberian-grasi- dalam-hukum-pidana-2.html>. Materi Kulia Ilmu Hukum.

Jimly Asshidiqe, Artikel “Gagasan Negara Hukum” diakses dari [http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)

Diakses dari [http:// repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47259/4/Chapter%20 I.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47259/4/Chapter%20I.pdf).

Tim Imparsial. Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia. Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia.

Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Diakses dari [http://www.kompasiana.com/lathifaksmw/hak-asasi-manusia-untuk-hidup\\_54f98672a3331142038b5231](http://www.kompasiana.com/lathifaksmw/hak-asasi-manusia-untuk-hidup_54f98672a3331142038b5231).

Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus\\_Tibo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Tibo).

Diakses dari <http://repository.unand.ac.id/17166/>.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 2002.

<http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminology-etymology.html>.

Ahmad Rajafi Sahran. Grasi di Indonesia. Diakses dari  
<https://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/grasi-di-indeonsia/>.



# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2325.1/In.39.6/PP.00.9/12/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : WAHDA SIDDA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kamp. Galung, 05 Juli 1998  
NIM : 16.2500.009  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Dusun Susbater, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Hak Prerogatif Presiden Dalam Pemberian Grasi Tindak Pidana di Indonesia (Analisis Normatif Terhadap Ijtihad Umar Bin Khattab)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 17 Desember 2020

Dekan,





SRN IP000028

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dmpmp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
 Nomor : 28/IP/DPM-PTSP/1/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Wali Kota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
 NAMA : **WAHDA SIDDA**  
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM/HUKUM PIDANA ISLAM**  
 ALAMAT : **DUSUN SUBBATER, KEC . DUAMPANUA, PINRANG**  
 LUNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI TINDAK PIDANA DI INDONESIA (ANALISIS NORMATIF TERHADAP LIJTIHAD UMAR SIN KHATTAB)**

LOKASI PENELITIAN : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **08 Januari 2021 s.d 08 Februari 2021**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare  
 Pada Tanggal : 14 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**

  
**H. ANDI RUSIA, SH, MH**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)  
 NIP : 19820915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan aset hukum yang sah
- Dokumen ini telah dibenarkan secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BIRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdapat di database DPMPTSP Kota Parepare (sisa QRCode)









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132. Telepon (0421) 21307. Fax (0421) 24404.  
PO Box 909 Parepare 91100. website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B. 14/In 39.6/PP.00.9/01/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag  
NIP : 19711214 200212 2 002  
Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Tk I / IVb  
Jabatan : Dekan  
Instansi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : WAHDA SIDDA  
NIM : 16.2500.009  
Alamat : Dusun Susbater, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

adalah benar Telah Melakukan Penelitian Dengan Judul "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pemberian Grasi Tindak Pidana di Indonesia (Analisis Normatif Terhadap Ijtihad Umar Bin Khattab)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PAREPARE**

Parepare, 22 Januari 2021  
Dekan,

  
(Hj. Rusdaya Basri)

### Riwayat Hidup Penulis



**Wahda Sidda**, lahir di Kamp. Galung Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 05 Juli 1998. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Ani dan H. Sidda. Penulis memulai pendidikannya di TK Aisyah Bungi selama satu tahun dan melanjutkan sekolah di SDN 136 Bungi Kab. Pinrang. Pendidikan penulis tempuh 3 tahun di SMPN 2 Duampanua dan SMA penulis tempuh selama 3 tahun di SMAN 2 Pinrang.

Setelah penulis tamat pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang ini bertransformasi menjadi IAIN Parepare dengan konsentrasi kejuruan Hukum Pidana Islam. Dalam menempuh pendidikan tinggi penulis pernah mengikuti dan menjadi Finalis Essay Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan 2019 dengan judul “*Optimalisasi Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik*”.

Dari penghargaan yang diraih penulis selama menempuh pendidikan tinggi diatas hanyalah rekam jejak yang mesti penulis tuliskan namun diluar sana jauh lebih banyak mahasiswa hebat dari berbagai kampus jika dibandingkan dengan penulis masih jauh tertinggal. Akhir kata penulis bersyukur masih diberikan kesempatan menyelesaikan studi strata satu dengan judul skripsi “**Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi Tindak Pidana di Indonesia (Analisis Normatif Terhadap *Ijtihad* Umar Bin Khattab)**” dan dengan ini penulis layak memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H).